



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Direktorat Rumput Laut

TRIWULAN III

2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
DIREKTORAT RUMPUT LAUT

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan III Tahun 2024 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Rumput Laut selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan September Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Rumput Laut tahun 2024.

LKj Direktorat Rumput Laut triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja triwulan berikutnya pada tahun 2024 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2024
Direktur Rumput Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	viii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Permasalahan Utama.....	5
1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024.....	7
2.2. Sasaran Strategis.....	8
2.3. Penetapan Kinerja.....	9
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut TW III Tahun 2024.....	12
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.2. Analisis Kinerja.....	16
3.2.1. Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Rumput Laut.....	16
3.2.1.1. Tenaga kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut.....	16
3.2.2. Terkelolanya Sistem Perbenihan yang Berkelanjutan.....	17
3.2.2.1. Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat.....	17
3.2.2.2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat.....	19
3.2.2.3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat.....	21
3.2.2.4. Calon Induk Unggul yang Diproduksi.....	23
3.2.2.5. Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat.....	25
3.2.2.6. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat.....	26
3.2.2.7. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun.....	27
3.2.2.8. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi.....	30
3.2.3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan.....	33
3.2.3.1. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun.....	33
3.2.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan.....	37
3.2.4.1. Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB.....	37

3.2.5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Rumput Laut	38
3.2.5.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	38
3.2.5.2. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Rumput Laut.....	39
3.2.5.3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	39
3.2.5.4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	40
3.2.5.5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	41
3.2.5.6. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA.....	42
3.2.5.7. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut.....	43
3.2.5.8. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut	44
3.2.5.9. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut	44
BAB 4. PENUTUP.....	46
4.1. KESIMPULAN.....	46
4.2. REKOMENDASI.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel A. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Perbenihan Tahun 2024.....	viii
Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Rumput Laut Tahun 2024.....	2
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Direktorat Rumput Laut	15
Tabel 3.2. Capaian tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut Triwulan 3 Tahun 2024.....	16
Tabel 3.3. Capaian indikator kinerja bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat.....	18
Tabel 3.4. Unit Pelaksana Teknis DJPB yang melaksanakan bantuan calon induk	20
Tabel 3.5. Capaian IKU Calon induk yang didistribusikan berdasarkan usulan masyarakat.	20
Tabel 3.6. Capaian indikator kinerja persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat.....	22
Tabel 3.7. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Triwulan III Tahun 2024	22
Tabel 3.8. Target Produksi Induk Tahun 2024.....	23
Tabel 3.9. Capaian Produksi Calon Induk di UPT Triwulan III Tahun 2024	24
Tabel 3.10. Capaian indikator kinerja bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat.....	26
Tabel 3.11. Capaian indikator kinerja persentase bantuan kebun bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat.....	27
Tabel 3.12. Capaian indikator kinerja modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan yang dibangun.....	29
Tabel 3.13. Capaian indikator kinerja progres operasional pusat produksi benih dan induk pada 3 lokasi.....	31
Tabel 3.14. Capaian Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun	34
Tabel 3.15. Capaian Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CPIB.....	37
Tabel 3.16. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut TW 3 tahun 2024	38
Tabel 3.17. Capaian Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024	39
Tabel 3.18. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024.....	40
Tabel 3.19. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar TW 3 Tahun 2024	41
Tabel 3.20. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024.....	42
Tabel 3.21. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA TW 3 Tahun 2024.....	42

Tabel 3.22.Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024.....	43
Tabel 3.23.Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024	44
Tabel 3.24.Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut TW 3 tahun 2024	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.....	5
Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024.....	7
Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024.....	8
Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024.....	12
Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024.....	14
Gambar 3.1. Target Produksi Calon Induk.....	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan III Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaku pada triwulan III Direktorat Rumput Laut mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,53 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 20 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel A.

Tabel A. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Perbenihan Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian
			Thn 2024	TW3	TW 3
SK.01	Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Rumput Laut				0
IKSK.01.1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut (orang)	orang	2.975	0	0
SK.02	Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan				0
IKSK.02.1	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.2	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.3	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.4	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (ekor)	ekor	1.000.000	0	0
IKSK.02.5	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.6	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.7	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (lokasi)	lokasi	2	0	0
IKSK.02.9	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (persen)	persen	60	0	0
SK.03	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan				0
IKSK.03.1	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun (persen)	persen	70	0	0
SK.04	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan				31,75
IKSK.04.1	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB (persen)	persen	50	25	31,75
SK.05	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Rumput Laut				
IKSK.05.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut (persen)	persen	85	0	0
IKSK.05.2	Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut (nilai)	nilai	82	0	0
IKSK.05.3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat	persen	80	80	74,07

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian
			Thn 2024	TW3	TW 3
	Rumput Laut (persen)				
IKSK.05.4	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut (persen)	persen	94	94	133,33
IKSK.05.5	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut (persen)	persen	80	0	0
IKSK.05.6	Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)	persen	91	50	67,6
IKSK.05.7	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut (nilai)	nilai	75	0	0
IKSK.05.8	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut (persen)	persen	80	80	100
IKSK.05.9	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut (persen)	persen	90	65	34,24

Capaian indikator pada Triwulan III tahun 2024 seperti terlihat tabel A menunjukkan bahwa kinerja perbenihan sangat baik karena beberapa indikator kinerja utama untuk melebihi dari target 100%, kecuali 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target yaitu hasil pengawasan Itjen yang dimanfaatkan dan penyerapan anggaran.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Rumput Laut, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Rumput Laut Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Rumput Laut	1.	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut (orang)	2.975
2.	Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan	2.	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		5.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (ekor)	1.000.000
		6.	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		7.	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		8.	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (lokasi)	2
		9.	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (persen)	60
		3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan	10.
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan	11.	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB (persen)	50
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat	12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	85
		13.	Nilai PM SAKIP di Direktorat	82

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Rumput Laut	Perbenihan (nilai)	
	14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	80
	15. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	94
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	80
	17. Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)	91
	18. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (nilai)	75
	19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (persen)	80
	20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan (persen)	98

1.2. Maksud dan Tujuan

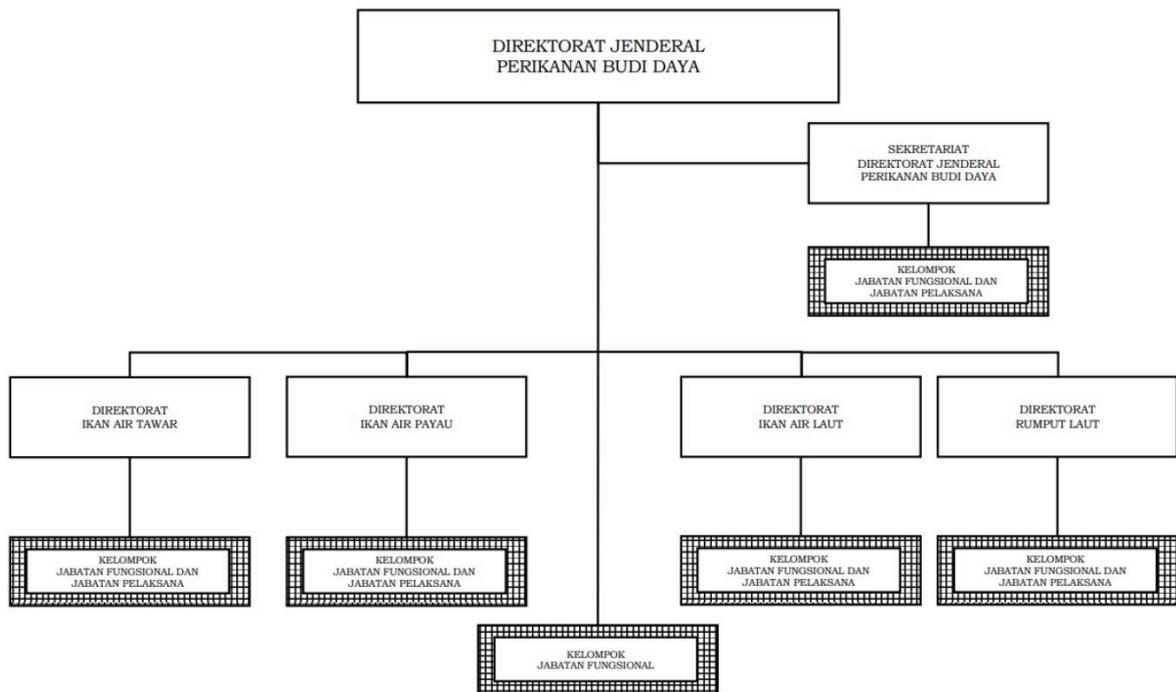
Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan III tahun 2024 Direktorat Rumput Laut ini adalah sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pencapaian target IKU di triwulan berikutnya agar pencapaian target tahunan dapat terpenuhi secara sempurna.

1.3. Tugas dan Fungsi

Direktorat Rumput Laut berdasarkan Permen No.5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas rumput laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

1.4. Permasalahan Utama

Secara umum permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam Kinerja Direktorat Rumput Laut terutama dalam upaya peningkatan produksi perikanan budi daya adalah isu jaminan keamanan pangan produk yang menjadi tuntutan, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri, sehingga pentingnya jaminan bagi unit pembenihan untuk menghasilkan benih yang sehat dan bermutu melalui sertifikasi CPIB.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan Kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada triwulan III Tahun 2024. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Rumput Laut, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) triwulan III Tahun 2024 dengan target kinerja pada triwulan tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada triwulan III tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Rumput Laut termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 - 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2022 serta penetapan kinerja Direktorat Rumput Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Rumput Laut serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan.

Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Rumput Laut sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Direktorat Perbenihan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kampung Budidaya berbasis kearifan lokal;
- b. Terkelolanya perikanan budi daya berkelanjutan;
- c. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang perbenihan; dan
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Satker Direktorat Rumput Laut.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Rumput Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penetapan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja (IKK) Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Direktorat Rumput Laut selama 3 (tiga) triwulan, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024; dan
- c. Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

2.3. Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja, maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai Perjanjian Kinerja antara Direktorat Rumput Laut dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2024 seperti terlihat dalam gambar 2.3.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT RUMPUT LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : Direktur Rumput Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut


Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT RUMPUT LAUT**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Rumput Laut	1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut (Orang)	2.975
2.	Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan	2. Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5. Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Ekor)	1.000.000
		6. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		7. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		8. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (Lokasi)	2
		9. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk (Persen)	60
		3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan	11. Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CPIB (Persen)	50
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Rumput Laut	12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13. Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut (Nilai)	82
	14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	80
	15. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	94
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	80
	17. Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
	18. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut (Nilai)	75
	19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut (Persen)	80
	20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut (Persen)	98

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Nono Hartanto

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	38.681.994.000
2.	Dukungan Manajerial	1.200.000.000
Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2024		39.881.994.000

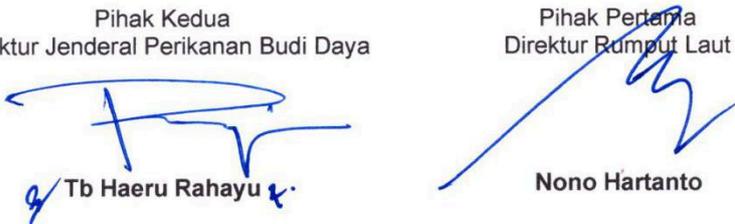
Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut

Tb Haeru Rahayu

Nono Hartanto



Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut TW III Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Rumput Laut dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumput Laut dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Rumput Laut TW III Tahun 2024, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id";

5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

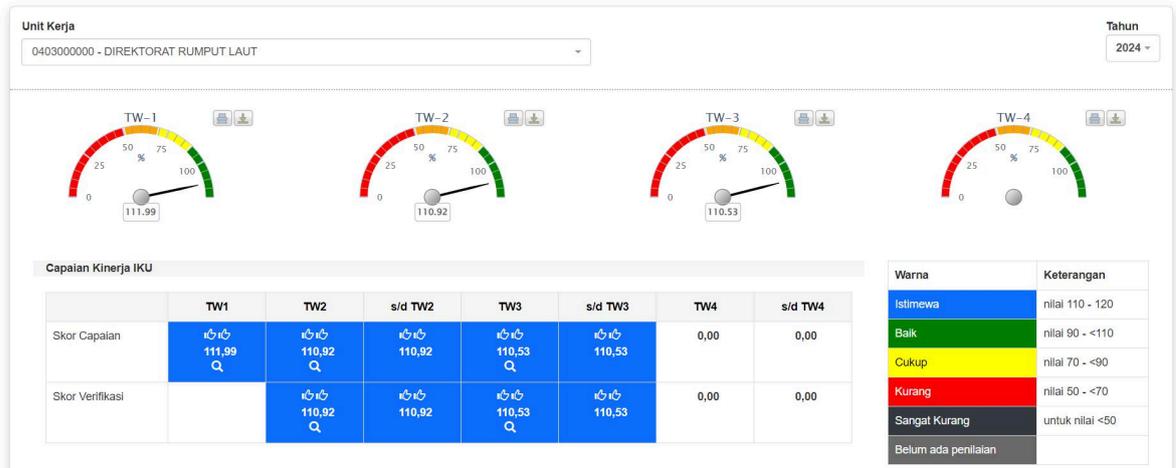
2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi “Kinerjaku”, capaian NKO Direktorat Rumpun Laut triwulan III tahun 2024 sebesar 110,53 % seperti terlihat dalam gambar 2.4.



Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Rumput Laut, yang menjadi indikator utama sebanyak 11 indikator dan 9 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Direktorat Rumput Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2024	TW III	
				TARGET	CAPAIAN
1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut	orang	2.975	0	0
2	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
3	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
4	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
5	Calon Induk Unggul yang Diproduksi	ekor	1.000.000	0	0
6	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
7	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
8	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun	lokasi	2	0	0
9	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi	persen	60	0	0
10	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun	persen	70	0	0
11	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB	persen	50	25	31,75
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	85	0	0
13	Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan	nilai	82	0	0
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	80	80	74,07
15	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	94	94	133,33
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	80	0	0
17	Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA	persen	91	50	67,6
18	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut (nilai)	nilai	75	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2024	TW III	
				TARGET	CAPAIAN
19	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut	persen	80	80	100
20	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut	peren	90	65	34,24

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Rumput Laut

3.2.1.1. Tenaga kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut

Indikator kinerja ini merupakan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pengelolaan Rumput Laut pada Direktorat Rumput Laut tahun 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan program prioritas dan bantuan pemerintah.

Pengukuran jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan rumput laut pada Direktorat Rumput Laut merupakan penyesuaian atas Indikator Kinerja pengukuran jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan perbenihan ikan pada Direktorat Perbenihan. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Permen KP No 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.

Target tenaga kerja mengalami penyesuaian dari target sebesar 11.504 orang yang terdiri dari tenaga kerja langsung sebesar 10.884 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 620 orang menjadi sebesar 2.975 orang yang terdiri dari tenaga kerja langsung sebesar 2.355 orang dan tenaga langsung 70 orang dan tenaga tidak langsung sebesar 310 orang.

Tabel 3.2. Capaian tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut Triwulan 3 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan Iku 2023		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan							
		Tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut							
		2024				% Capaian		% pertumbuhan thn 2023-2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024
Realisasi		Target		Realisasi			Target 2025		% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024			
-	22.720	2.975	-	1.221	-	41,04	-	-	-

Capaian yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah di bidang rumput laut, hasil identifikasi dan perhitungan data yang ada terlihat dalam tabel 1 realisasi jumlah tenaga yang terserap sebesar 1.221 orang atau tercapai 41,04 % dari target 2.975 orang.

Besarnya realisasi jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat dibidang rumput laut terdiri dari tenaga yang terlibat dalam kegiatan bantuan bibit RL sebanyak 150 orang dan bantuan KBRL sebanyak 560 orang, bantuan modeling RL di Maluku Tenggara 80 orang dan bantuan Modeling RL di Rote Ndao sebanyak 72 orang. Sedangkan, tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dibidang rumput laut sebanyak 359 dari kegiatan bantuan modeling RL di Maluku Tenggara. Tenaga kerja tidak langsung ini berasal beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan modeling budidaya rumput laut antara lain:

- a. Kegiatan pemasangan dan setting rumah ikat sebanyak 14 orang yang terdiri dari 11 orang warga lokal dan 3 orang dari tenaga penyedia;
- b. Kegiatan pembuatan pelampung batok kelapa sebanyak 126 orang yang berasal dari Selayar, Debut, Dunwahan;
- c. Kegiatan pembangunan UPBRL dan bangunan pendukung sebanyak 45 orang;
- d. Kegiatan pembuatan pemberat beton sebanyak 62 orang;
- e. Kegiatan setting tali di darat sebanyak 65 orang; dan
- f. Kegiatan setting tali di laut sebanyak 20 orang

Sehingga, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan modeling rumput laut berbasis kawasan sebanyak 511 orang.

3.2.2. Terkelolanya Sistem Perbenihan yang Berkelanjutan

3.2.2.1. Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat

Kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan khususnya untuk peningkatan produksi ikan air tawar, payau, dan laut perlu penyediaan unit pembenihan ikan di daerah pengembangan perikanan budi daya. Pada tahun anggaran 2024, bantuan sarpras UPR dan HSRT yang disalurkan ke masyarakat diberikan di beberapa lokasi Kampung Perikanan

Budidaya untuk turut serta dalam mendukung Program Terobosan yang bergerak pada sektor perikanan budidaya.

Tujuan pelaksanaan bantuan adalah untuk meningkatkan produksi benih ikan bermutu di masyarakat karena ketersediaan benih ikan yang dimaksud tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah atau perusahaan skala besar. Oleh karena itu, pemenuhan benih ikan bermutu juga membutuhkan peran serta masyarakat agar ketersediaan benih di berbagai daerah dapat terpenuhi.

Bantuan sarpras UPR/ HSRT TA 2024 dilakukan oleh 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budi Daya (BBPBAT Sukabumi, BPBAT Sungai Gelam Jambi, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, dan BPBAP Takalar) sebanyak 30 paket di 29 Kabupaten/ Kota dengan wilayah lokasi penyaluran yaitu Sukabumi, Bandung, Purwakarta, Tasikmalaya, Temanggung, Wonosobo, Grobogan, Demak, Merangin, Sungai Penuh, Kuantan Singingi, Kota Pariaman, Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Lampung Utara, HS Selatan, HS Tengah, Malinau, Kapuas, Pulang Pisau, Kutai Kertanegara, Sinjai, Gowa, Bulukumba, Minahasa Utara, Pinrang, Enrekang, Maros, dan Soppeng.

Jenis bantuan berupa sarana sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 441 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Unit Pembenihan Rakyat dan Hatchery TA 2024. Bantuan sarana unit pembenihan yang diberikan dengan menu yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi lapangan atau kebutuhan kelompok penerima bantuan, antara lain: (a) Bentuk Induk dan pakan (induk ikan, pakan induk, pakan benih, dan/ atau larva/ telur); dan (b) Peralatan pendukung (peralatan perikanan, peralatan uji kualitas air, aerasi, wadah pemeliharaan, instalasi air, peralatan resirkulasi, sarana biosecurity, instalasi penetasan telur, obat ikan dan vitamin, instalasi penetasan telur). Komoditas ikan yang diberikan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Kepmen KP Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya.

Tabel 3.3. Capaian indikator kinerja bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3					
100%	100%	75%	-	75%	-	100%	-	-	-

Dalam rangka penyaluran bantuan sarpras UPR dan HSRT tahun 2024, telah diverifikasi usulan sebanyak 40 proposal dari target 30 paket bantuan. Berdasarkan tabel di atas, pada periode TW III telah terealisasi atau terdistribusi bantuan UPR dan HSRT sebanyak 30 paket, yang artinya target bantuan sudah tercapai.

Perhitungan realisasi bantuan sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke masyarakat adalah perbandingan antara jumlah bantuan sarana yang disalurkan dengan jumlah bantuan sarana yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi, sehingga capaian yang diperoleh yaitu 75%.

Jumlah proposal yang diverifikasi sebanyak 40 proposal dengan rincian sebagai berikut: (1) BBPBAT Sukabumi: 8 proposal; (2) BPBAT Sei Gelam: 14 proposal; (3) BPBAT Mandiangin: 6 proposal; (4) BPBAT Tatelu: 4 proposal; dan (5) BPBAP Takalar: 8 proposal.

Pagu anggaran kegiatan bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan realisasi pada periode triwulan III sebesar Rp1.326.133.299,- atau 88,41%.

Rencana tindak lanjut triwulan IV tahun 2024, yaitu sisa anggaran kegiatan akan digunakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

3.2.2.2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat

Dalam usaha budidaya ikan secara intensif dibutuhkan benih dan induk yang memiliki kualitas baik. Induk yang unggul akan dapat menghasilkan benih ikan yang bermutu pula. Sedangkan dengan melakukan pemeliharaan benih yang bermutu maka proses produksi akan menjadi efektif dan efisien. Program bantuan calon induk merupakan salah satu program prioritas yang ditujukan untuk peremajaan induk-induk yang ada di masyarakat, dimana sasaran bantuan calon induk ini adalah unit-unit pembenihan milik masyarakat maupun balai benih milik pemerintah provinsi atau kabupaten.

Kegiatan bantuan calon induk dilaksanakan oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat Perbenihan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi memproduksi calon induk ikan air tawar, payau, dan laut. Target bantuan calon induk yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah

60.914 ekor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Jenis calon induk ikan yang dibantukan antara lain ikan nila, lele, mas, patin, papuyu, nilem, gabus haruan, udang vanname, bandeng, kakap putih, dan bawal bintang. Adapun rincian target pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan penugasan yaitu:

Tabel 3.4. Unit Pelaksana Teknis DJPB yang melaksanakan bantuan calon induk

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
1	Direktorat Perbenihan	25.169
2	BBPBAT Sukabumi	7.742
3	BPBAT Sungai Gelam Jambi	6.856
4	BPBAT Mandiangin	6.284
5	BPBAT Tatelu	5.713
6	BPBAP Ujung Batee	805
7	BPBAP Takalar	3.218
8	BPIUUK Karangasem	4.983
9	BBPBL Lampung	32
10	BPBL Ambon	20
11	BPBL Lombok	20
12	BPBL Batam	72
Jumlah Target		60.914

Indikator Kinerja Bantuan Calon Induk ini diukur secara semesteran dengan target 75%, dimana dalam penghitungannya adalah membandingkan antara jumlah calon induk yang direalisasikan dengan hasil verifikasi. Beberapa UPT telah merealisasikan bantuan calon induk pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 54.381 ekor atau 89,28% dari target. Satker yang telah merealisasikan bantuan calon induk diantaranya yaitu BBPBAT Sukabumi sebanyak 28.685 ekor, BPBAT Sungai Gelam 7.880 ekor, BPBAT Mandiangin 5.200 ekor, BPBAT Tatelu 2.800 ekor, BPBAP Takalar 3.400 ekor, BBPBL Lampung 35 ekor, BPBL Ambon 30 ekor, Direktorat Rumput Laut 1.351 ekor, dan BPIUUK Karangasem 5.000 ekor. Bantuan calon induk tersebut telah terdistribusi kepada 135 pokdakan yang tersebar di 15 provinsi dan 52 kabupaten/kota.

Tabel 3.5. Capaian IKU Calon induk yang didistribusikan berdasarkan usulan masyarakat.

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan							
IKU		Persentase calon induk yang disalurkan ke masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% perbandingan dengan TW III 2023	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Target 2024		% capaian thd target akhir Renstra	
TW III	Tahun 2023	Tahunan	TW III	TW III	Thd realisasi TW III 2024	Thd target tahun 2024			
94,27%	203,43%	75%	-	89,28%	-	119,03%	94,71%	-	-

Dalam rangka pencapaian target bantuan calon induk pada periode berikut, maka disiapkan rencana aksi untuk mempercepat proses pelaksanaan program bantuan calon induk ke masyarakat, diharapkan setiap UPT lingkup DJPB dapat

menindaklanjuti adanya usulan yang telah masuk dan melakukan identifikasi dan verifikasi kepada calon penerima bantuan serta segera mendistribusikannya setelah ada penetapan.

3.2.2.3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu dilakukan penyediaan benih ikan, diantaranya melalui program bantuan benih ikan.

Program bantuan benih ikan merupakan salah satu kegiatan prioritas andalan Ditjen Perikanan Budi Daya. Benih ikan merupakan faktor penting dalam kegiatan pembudidayaan ikan, karena pembudidaya ikan kecil masih sangat memerlukan bantuan ikan benih bermutu yang dihasilkan dari induk ikan unggul. Tujuan bantuan benih ikan adalah untuk menstimulus kegiatan budi daya ikan, meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan, dan untuk menambah stok sumber daya ikan pada suatu perairan umum.

Pelaksanaan bantuan benih berpedoman pada Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 381 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024. Pemberi bantuan benih ikan adalah Direktorat Perbenihan (berdasarkan Permen KP No 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, semula Direktorat Perbenihan diubah menjadi Direktorat Rumput Laut) dan Satker UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu BBPBAT Sukabumi, BBPBL Lampung, BPBAT Sungai Gelam Jambi, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPBL Batam, BPIUUK Karangasem, dan/atau Satker lingkup DJPB yang ditunjuk oleh Dirjen Perikanan Budi Daya.

Kegiatan bantuan benih ikan merupakan kegiatan penugasan yang tetap dilakukan hingga akhir tahun anggaran 2024.

Tabel 3.6. Capaian indikator kinerja persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3					
110,32%	114,06%	75%	-	70,30%	-	93,73%	-	-	-

Bantuan benih bermutu ikan air tawar, payau, laut, udang, dan kepiting yang didistribusikan ke masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu para pembudidaya skala kecil dan mikro untuk meningkatkan hasil produksi, serta untuk restocking ikan lokal di perairan umum dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya genetik dan pemanfaatan produktivitas perairan umum, sehingga berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat.

Pada periode triwulan III, benih yang telah terdistribusi sebanyak 61.081.885 atau 70,30% ekor dari target 86.889.630 ekor. Realisasi bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat periode triwulan III tahun anggaran 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Triwulan III Tahun 2024

No	UPT DJPB	Benih yang Terverifikasi (Ekor)	Benih yang Terdistribusi (Ekor)					Benih yang Terdistribusi (Ekor)	Persentase (%)
			Tawar	Payau	Laut	Udang	Kepiting		
1	DIREKTORAT PERBENIHAN	19.676.740	1.042.620	100.000	-	-	-	1.142.620	5,81
2	BBPBAT SUKABUMI	10.389.046	11.630.255	-	-	-	-	11.630.255	111,95
3	BPBAT SEI GELAM	5.779.024	3.857.500	-	-	-	-	3.857.500	66,75
4	BPBAT MANDIANGIN	3.923.361	3.309.000	-	-	-	-	3.309.000	84,34
5	BPBAT TATELU	4.073.431	2.813.700	-	-	-	-	2.813.700	69,07
6	BPBAP UJUNG BATEE	8.081.492	-	381.000	107.850	7.390.960	-	7.879.810	97,50
7	BPBAP TAKALAR	16.761.396	-	1.814.500	50.000	13.100.000	200.000	15.164.500	90,47
8	BBPBL LAMPUNG	647.000	-	-	498.500	-	-	498.500	77,05
9	BPBL AMBON	541.000	-	-	535.700	-	-	535.700	99,02
10	BPBL BATAM	556.320	-	-	489.500	-	-	489.500	87,99
11	BPBL LOMBOK	343.000	-	-	212.800	-	-	212.800	62,04
12	BPIUUK KARANGASEM	16.117.820	-	-	148.000	13.400.000	-	13.548.000	84,06
	Jumlah	86.889.630	22.653.075	2.295.500	2.042.350	33.890.960	200.000	61.081.885	70,30

Pagu anggaran bantuan benih ikan sebesar Rp. 27.482.890.000,- Realisasi keuangan periode triwulan III tahun 2024 yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 9.203.870.050,-

Dalam pencapaian IKU, permasalahan yang dihadapi adalah pengajuan proposal tersendat. Rencana tindak lanjut triwulan IV tahun 2024, yaitu: (1) Koordinasi dengan Dinas Perikanan setempat; (2) Perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap dokumen usulan bantuan yang diterima untuk dilengkapi sesuai dengan Juknis bantuan; dan (3) Terkait dengan kesiapan lahan penerima, perlu dilakukan verifikasi dan identifikasi CPCL.

Satker DJPB yang melakukan penyaluran agar tetap konsisten terhadap target yang telah ditetapkan sehingga pencapaian penyaluran bantuan benih ikan dapat berjalan dengan lancar, serta melakukan monitoring serta pelaporan secara rutin terkait bantuan benih ikan air tawar, payau, laut, udang, dan kepiting.

3.2.2.4. Calon Induk Unggul yang Diproduksi

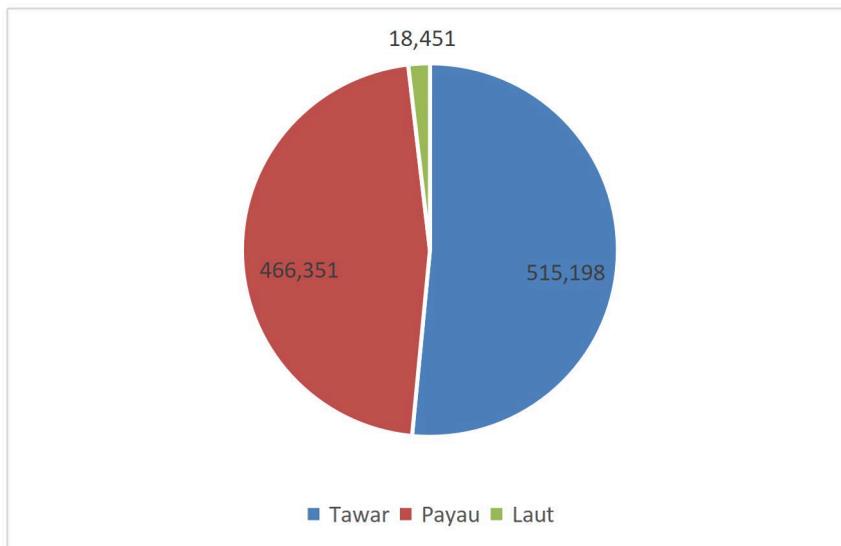
Penyediaan induk unggul menjadi salah satu tugas pokok bagi unit pelaksana teknis di bawah DJPB. Melalui produksi ini, diharapkan akan memastikan ketersediaan benih bermutu. Pada tahun anggaran 2024, sebanyak 1.000.000 ekor calon induk menjadi target produksi bagi UPT lingkup DJPB dengan alokasi anggaran yang disediakan sebanyak Rp. 40.000.000.000,-. Sedangkan rincian target per UPT tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.8. Target Produksi Induk Tahun 2024

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
1	BBPBAT Sukabumi	167.638
2	BPBAT Sungai Gelam Jambi	119.901
3	BPBAT Mandiangin	113.690
4	BPBAT Tatelu	80.343
5	BBPBAP Jepara	97.421
6	BPBAP Ujung Batee	54.991
7	BPBAP Situbondo	80.981
8	BPBAP Takalar	79.979
9	BLUPPB Karawang	74.724
10	BPIUUK Karangasem	114.413
11	BBPBL Lampung	4.305
12	BPBL Ambon	4.090
13	BPBL Lombok	3.476
14	BPBL Batam	4.048
	Jumlah Target	1.000.000

Komoditas yang diproduksi sebagai calon induk, terdiri atas beberapa spesies. Pada komoditas ikan air tawar seperti ikan mas, nila, lele, patin, gurami, serta ikan-ikan lokal lainnya. Komoditas ikan air payau, diantaranya adalah udang vanname, udang windu, bandeng, dan kepiting. Sedangkan untuk komoditas ikan laut antara

lain kerapu, kakap putih, bawal bintang, bubara dan kobia. Berdasarkan jenis komoditasnya, target produksi calon induk dapat terlihat dalam diagram berikut.



Gambar 3.1. Target Produksi Calon Induk

Pada diagram diatas, target produksi calon induk ikan air tawar sebesar 515.198 ekor (51,5%), calon induk air payau 466.351 ekor (46,6%) dan calon induk laut 18.451 ekor (1,8%).

Kegiatan produksi calon induk di UPT lingkup DJPB pada periode triwulan III tahun 2024 telah mampu menghasilkan produksi calon induk sebanyak 702.903 ekor atau 70,28% dari target. Adapun rinciannya adalah produksi calon induk ikan air tawar 369.337 ekor, calon induk ikan air payau 323.463 ekor, dan calon induk ikan laut 10.003 ekor.

Tabel 3.9. Capaian Produksi Calon Induk di UPT Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan							
IKU		Calon induk unggul yang diproduksi							
2023		2024			% Capaian		% perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW III	Tahun 2023	Tahunan	TW III	TW III	Thd realisasi TW III 2024	Thd target tahun 2024	TW III 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
729.063	1.039.745	1.000.000	-	702.903	-	70,28%	105,12%	1.000.000	70,28%

Dalam rangka pencapaian target produksi calon induk pada periode berikutnya, direncanakan bahwa pada setiap UPT untuk tetap melakukan proses pemeliharaan dan secara rutin menyeleksi calon-calon induk.

Pagu anggaran untuk kegiatan pada IKU calon induk unggul yang diproduksi adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- dan sampai dengan triwulan III telah terealisasi sebesar Rp. 28.223.727.019,- atau 70,56%.

3.2.2.5. Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang telah ditetapkan KKP. Produksi budi daya rumput laut tahun 2022 sebesar 9,23 juta ton yang berkontribusi sebanyak 62,07% dari total produksi perikanan budidaya pada tahun 2022. Sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia adalah 175.967 ha. Jenis rumput laut yang dibudi dayakan yaitu *Eucheuma cottonii*.

Permasalahan dalam pengembangan industri rumput laut adalah keterbatasan bibit rumput laut yang berkualitas, tahan penyakit, cepat tumbuh dan selalu tersedia sepanjang musim. DJPB melalui unit pelaksana teknisnya telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut di 6 (enam) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi dari UPT akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut.

Persentase bantuan bibit rumput laut diukur berdasarkan jumlah bibit yang disalurkan berbanding dengan jumlah usulan bibit rumput laut yang terverifikasi.

Capaian Persentase bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke Masyarakat pada Triwulan 3 tahun 2024 yakni 70,74% atau sebanyak 18.600 Kg dari target tahunan sebanyak 26.300 Kg. Kelompok penerima bantuan bibit rumput laut berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Bali, dan sentra perikanan budidaya lainnya.

Tabel 3.10. Capaian indikator kinerja bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3					
-	-	75%	-	70,72%	-	94,30%	-	-	-

Perhitungan realisasi bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah perbandingan antara jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan dengan jumlah bantuan bibit rumput laut yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi, sehingga capaian yang diperoleh yaitu 70,72% dari target per tahun 75% bantuan yang terealisasi.

Pagu anggaran kegiatan bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi pada periode triwulan III sebesar Rp695.814.975,- atau 69,58%.

Rencana tindak lanjut triwulan IV tahun 2024, yaitu agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Bibit rumput laut, agar UPT mempercepat proses pengadaan.

3.2.2.6. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang telah ditetapkan KKP. Produksi budidaya rumput laut tahun 2022 sebesar 9,23 juta ton yang berkontribusi sebanyak 62,07% dari total produksi perikanan budidaya pada tahun 2022. Sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia adalah 175.967 ha. Jenis rumput laut yang dibudidayakan yaitu cottonii dan sargasum.

Salah satu permasalahan dalam budidaya rumput laut keterbatasan bibit dan sarana pemeliharannya. Kualitas bibit rumput laut akan mempengaruhi hasil produksi akhirnya. Masyarakat pembudidaya rumput laut saat ini kesulitan dalam memperoleh bibit rumput laut, serta sarana pemeliharaan bibit yang standar. Oleh karena itu, DJPB menyediakan program bantuan kebun bibit rumput laut bagi para pembudidaya rumput laut untuk dapat membantu menyiapkan dan menyediakan bibit di sentra budidaya rumput laut di wilayahnya.

Bantuan kebun bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu para pembudidaya skala kecil dan mikro untuk meningkatkan hasil produksi, serta untuk meregenerasi rumput laut yang ada di pembudidaya dengan generasi yang lebih muda sehingga berdampak baik pada kualitas mutu rumput laut dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.11. Capaian indikator kinerja persentase bantuan kebun bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	133,33%	75%	-	84,44%	-	112,59%	-	-	-

Dalam rangka penyaluran bantuan bibit rumput laut tahun 2024, telah dilaksanakan verifikasi yang dilakukan oleh UPT lingkup DJPB penanggung jawab bantuan kebun bibit rumput laut dengan target 90 paket per tahun. Berdasarkan tabel diatas, pada periode TW III telah terealisasi atau terdistribusi bantuan kebun bibit rumput laut sebanyak 76 paket.

Perhitungan realisasi bantuan kebun bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah perbandingan antara jumlah bantuan kebun bibit rumput laut yang disalurkan dengan jumlah bantuan kebun bibit rumput laut yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi, sehingga capaian yang diperoleh yaitu 84,44% dari target per tahun 75% bantuan yang terealisasi. Pagu anggaran bantuan kebun bibit rumput laut sebesar Rp. 4.950.000.000,- Realisasi keuangan periode triwulan III tahun 2024 yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 4.180.000.000,-.

Rencana tindak lanjut triwulan IV tahun 2024, yaitu agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Kebun Bibit rumput laut, agar UPT mempercepat proses verifikasi terhadap usulan proposal yang diajukan.

3.2.2.7. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode tahun 2021-2024 mencanangkan 5 Program Terobosan. Dalam implementasi program terobosan tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya fokus pada 2 program yaitu: 1) pengembangan

perikanan budidaya berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan, antara lain: udang, lobster, kepiting, dan rumput laut; dan 2) pembangunan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan mengingat permintaan pasar yang tinggi serta metode budidaya yang sederhana. Permintaan rumput laut yang besar dikarenakan perannya yang sangat penting dalam berbagai produk yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik melalui pengolahan sederhana yang langsung dapat dikonsumsi, maupun melalui pengolahan yang lebih kompleks, seperti produk farmasi, kosmetik, dan pangan, serta produk lainnya.

Pada tahun 2020, Indonesia adalah negara produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan volume 9,6 juta ton setelah China (20,8 juta ton) sementara urutan ketiga dan keempat adalah Korea Selatan (1,7 juta ton) dan Filipina (1,4 juta ton) (FAO, 2022). Produksi ini masih bisa ditingkatkan karena Indonesia memiliki potensi area budidaya laut yang cukup besar yaitu ±12 juta ha, serta iklim tropis yang mendukung untuk budidaya rumput laut. Dengan demikian tingkat pemanfaatan lahan budidaya Rumput laut baru masih rendah. Untuk mewujudkan peningkatan produksi rumput laut diperlukan pendekatan untuk menyediakan budidaya berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat, yang bertujuan agar system logistic bibit rumput laut dapat lebih efektif dan efisien, terintegrasi dan komprehensif dapat memenuhi kebutuhan rumput laut pada suatu wilayah regional. Pengembangan kawasan budidaya rumput laut di tahun 2024 akan dilakukan di Propinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur mengingat kedua Propinsi tersebut merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.

Berdasarkan Permen KP No. 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan sebagai salah satu Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di Provinsi Maluku setelah Kota Tual. Namun demikian dari potensi yang ada, pemanfaatannya baru 781,6 ha (sekitar 11%) di Kei Kecil dan 64,7 ha (sekitar 8%) di Kei Besar. Sementara itu Kabupaten Rote Ndao yang terletak di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi budidaya rumput laut seluas 32.000 Ha dan baru termanfaatkan sebanyak 2.124 Ha.

Pengukuran capaian atas indikator ini adalah dengan melihat progres pelaksanaan kegiatan di 2 lokasi modeling budidaya rumput laut berbasis kawasan ini.

Tabel 3.12. Capaian indikator kinerja modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan yang dibangun

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3					
-	1	2	-	31%	0	0	-	-	-

Pengembangan modeling budi daya rumput laut yang dilaksanakan pada tahun 2024 bertempat di Kab. Rote Ndao dan Maluku Tenggara dengan mengacu pada kegiatan modeling budi daya rumput laut yang telah dilaksanakan di Kab. Wakatobi pada tahun 2023. Bantuan pengembangan modeling budi daya rumput laut meliputi sarana dan prasarana perahu ketinting, mesin ketinting, kebun starter, kebun bibit rumput laut (KBRL), dan pembesaran budi daya rumput laut (BRL). Kemudian untuk mendukung produksi bibit rumput laut kultur jaringan meliputi unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan (UPBRL), peralatan dan bahan laboratorium, dan kendaraan roda tiga.

a. Kab. Rote Ndao

Progres pekerjaan pembangunan modeling budi daya rumput laut yang telah dilaksanakan periode triwulan 3, yaitu :

- Telah dilakukan pekerjaan perencanaan meliputi Feasibility study (Studi kelayakan), penyusunan masterplan, dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Unit Produksi Bibit Rumput Laut (UPBRL) kultur jaringan;
- Telah dilakukan pengadaan kendaraan roda tiga, perahu ketinting, dan mesin ketinting;
- Pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi pembangunan UPBRL, sarana modeling budi daya rumput laut (kebun starter, KBRL, dan BRL);
- Pengadaan yang sedang dilakukan meliputi peralatan dan bahan pendukung operasional laboratorium.

Rencana tindak lanjut triwulan IV tahun 2024, yaitu percepatan pelaksanaan pekerjaan seperti pembangunan UPBRL, sarana modeling budi daya rumput laut, dan pengadaan peralatan dan bahan pendukung operasional laboratorium. Penyusunan dokumen pengadaan dan dokumen pembayaran pada pekerjaan yang telah dilaksanakan.

b. Kab. Maluku Tenggara

Progres pekerjaan pembangunan modeling budi daya rumput laut yang telah dilaksanakan periode triwulan 3, yaitu :

- Telah dilakukan pekerjaan perencanaan meliputi Feasibility study (Studi kelayakan), penyusunan masterplan, dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Unit Produksi Bibit Rumput Laut (UPBRL) kultur jaringan;
- Telah dilakukan pengadaan kendaraan roda tiga, perahu ketinting, dan mesin ketinting;
- Pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi pembangunan UPBRL, sarana modeling budi daya rumput laut (kebun starter, KBRL, dan BRL);
- Pengadaan yang sedang dilakukan meliputi peralatan dan bahan pendukung operasional laboratorium.

Rencana tindak lanjut triwulan IV tahun 2024, yaitu percepatan pelaksanaan pekerjaan seperti pembangunan UPBRL, sarana modeling budi daya rumput laut, dan pengadaan peralatan dan bahan pendukung operasional laboratorium. Penyusunan dokumen pengadaan dan dokumen pembayaran pada pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Perhitungan realisasi modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan tahun 2024 adalah jumlah persentase progres modeling budi daya rumput laut di Kab. Rote Ndao dan Kab. Maluku Tenggara dibagi dua. Pagu anggaran modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan sebesar Rp. 33.100.000.000,- Realisasi keuangan periode triwulan III tahun 2024 yang sebesar Rp. 7.900.831.802,-.

3.2.2.8. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi

Pusat produksi benih dan induk berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kab Mesuji (Prov. Lampung), Kab Musirawas (Prov. Sumatera Selatan), dan Kab Dharmasraya (Prov. Sumatera Barat).

Pada tahun 2024, BBPBAT Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dan operaisonal Pusat Produksi Benih dan Induk yang terletak di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sementara itu, BPBAT Sungai Gelam-Jambi mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan lahan *Broodstock Center* (BC) yang terletak di Desa Babat, Kecamatan STL Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Serta *Broodstock Center* (BC) di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.13. Capaian indikator kinerja progres operasional pusat produksi benih dan induk pada 3 lokasi

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan								
IKU		Terbangunnya prasarana dan sarana pusat produksi benih dan induk								
2023		2024				% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 2						
-	55%	60%	-	0	0	0	-	-	-	

a. Kab Mesuji

Progres operasional pusat produksi benih dan induk di Kab Mesuji periode triwulan III, yaitu:

- Memiliki sarana produksi, namun belum melakukan pemeliharaan.
- Pekerjaan yang telah dilakukan pada triwulan III, antara lain: (i) Pelaksanaan Pematangan Lahan; (ii) Pelaksanaan Pekerjaan Turap; (iii) Pelaksanaan Pembangunan R Genset; (iv) Pelaksanaan Pembangunan Gudang Pakan; (v) Pelaksanaan Pembangunan R Blower; dan (vi) Pelaksanaan Pembangunan Bak Tandon.
- Pada triwulan III Pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk di Mesuji dengan alokasi anggaran setelah revisi senilai Rp13.199.800.000,00, dengan realisasi senilai Rp7.380.029.948,00 atau 55,91%.
- Rencana tindak lanjut tahun 2024 untuk pusat produksi benih dan induk di Kab Mesuji, yaitu melanjutkan pembangunan fisik yang telah direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada RKA-KL Tahun 2024.

b. Kab Dharmasraya

Progres operasional BC di Kab Dharmasraya periode triwulan III, yaitu:

- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva) namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih

- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, dan sudah melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi berupa kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih, fasilitas pemeliharaan induk/ benih dan sudah mampu memproduksi benih
- Pada periode triwulan III telah dilaksanakan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan beton, pembangunan tandon air, pembangunan tower air, rehab pematang kolam, pembuatan saluran inlet outlet, dan pembuatan pintu air.
- Realisasi pembangunan fisik sudah mencapai 100%, sementara realisasi anggaran mencapai 95% dengan nilai anggaran sebesar Rp. 804.794.020.
- Rencana tindak lanjut tahun 2024, yaitu monitoring dan evaluasi.

c. Kab Musirawas

Progres operasional BC di Kab Musirawas periode triwulan III, yaitu:

- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva) namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, dan sudah melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi berupa kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih, fasilitas pemeliharaan induk/ benih dan sudah mampu memproduksi benih
- Pada periode triwulan III telah dilaksanakan pembangunan fisik berupa pembangunan rumah jaga, kantor administrasi dan jalan beton.
- Realisasi pembangunan fisik sudah mencapai 100%, sementara realisasi anggaran mencapai 95% dengan nilai anggaran sebesar Rp. 813.657.958.
- Rencana tindak lanjut tahun 2024, yaitu monitoring dan evaluasi.

3.2.3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan

3.2.3.1. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga NSPK bidang perbenihan merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan bidang perbenihan ikan.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang perbenihan ikan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan. Standar adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan bidang perbenihan ikan. Sedangkan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan.

Sesuai dengan Rencana Strategis DJPB tahun 2020 – 2024 telah ditargetkan sebanyak 64 NSPK bidang perbenihan yang diterbitkan. Namun hingga tahun 2023, baru tercatat sebanyak 45 NSPK atau 70,31%. Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya keseluruhan NSPK sesuai Renstra antara lain adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa forum terkait penyusunan NSPK bidang perbenihan tidak dapat dilaksanakan.

NSPK bidang perbenihan menjadi penting, karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan. Beberapa penyusunan NSPK bidang perbenihan yang direncanakan pada tahun 2024 antara lain petunjuk teknis bantuan pemerintah lingkup kegiatan pengelolaan perbenihan ikan, penyusunan Rancangan SNI bidang perbenihan, dan hasil rumusan forum perbenihan ikan nasional.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah rekomendasi kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang perbenihan ikan pada tahun 2024 dibandingkan terhadap target rekomendasi kebijakan bidang perbenihan tahun 2020 – 2024.

Tabel 3.14. Capaian Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun

Sasaran Kegiatan Iku 2023		Meningkatnya Akses Pemodalan dan Jaminan Usaha							
		persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun							
		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2023-2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target (%)		Realisasi		Target 2024		% Capaian thd target akhir Renstra	
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 3	Thd realisasi TW 1 2024		Thd target tahun 2024		
-	-	70	-	82,81	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan, sehingga belum dapat dilakukan analisa terhadap capaiannya. Adapun NSPK bidang perbenihan yang disusun antara lain rumusan Kegiatan Forum Jejaring Perbenihan Nasional, Penilaian Jenis Ikan Baru yang akan dibudidayakan, dan RSNI 3 Perikanan Budidaya Bidang Perbenihan.

Terkait progres kegiatan hingga triwulan III, rumusan kegiatan forum jejaring perbenihan nasional telah diselenggarakan pada Hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 2-4 Mei 2024 di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta. Adapun hasil Forum Jejaring Perbenihan Nasional tahun 2024 antara lain :

- a. Dalam rangka mendukung program revitalisasi tambak Pantura Jawa seluas 78.550 hektar, diperlukan dukungan penyediaan 700 ribu ekor induk dan 4,7 miliar benih.
- b. Diperlukan penyusunan *roadmap* dalam rangka penyediaan produksi induk unggul dan benih bermutu nila salin.
- c. Diperlukan benih yang memenuhi standar hasil produksi (Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Nasional Indonesia (SNI)) oleh para produsen benih, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembudi daya nila salin di tambak, baik dari aspek kualitas dan kuantitas.
- d. Memperbanyak induk unggul baru melalui pemuliaan dan mendorong induk hasil pemuliaan untuk diajukan pelepasan (release) sesuai prosedur ketentuan peraturan yang berlaku.
- e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap induk dan benih nila pasca pelepasan (*release*) yang bertujuan untuk memastikan performance, ketersediaan, dan distribusi.
- f. BRIN dan Perguruan Tinggi bersinergi dengan rencana program revitalisasi tambak Pantura Jawa untuk pengembangan teknologi pembenihan dan pembesaran untuk kegiatan budi daya nila salin.

- g. Pemerintah Daerah mendorong unit pembenihan di wilayahnya untuk menjadi anggota jejaring perbenihan, khususnya komoditas nila, serta menerapkan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
- h. Komitmen peserta forum yang hadir, yaitu : Meningkatkan produksi benih nila untuk mendukung budi daya nila salin di Pantura Jawa; Meningkatkan sinergitas antara produsen induk, benih, dan pembudi daya nila; Menjadikan Forum Jejaring Perbenihan sebagai ajang komunikasi bagi para produsen induk dan benih nila.

Berdasarkan Permen KP Nomor 21 tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan maka setiap jenis ikan baru yang diproduksi oleh pemulia ikan harus mendapat ketetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna memperoleh penetapan ini perlu dilakukan penilaian atas kualitas ikan baru yang akan dibudidayakan tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian terhadap jenis ikan baru yang akan dibudidayakan perlu penetapan keputusan Menteri KP yang digunakan sebagai dasar melaksanakan penilaian terhadap ikan yang akan dibudidayakan. Penetapan keputusan Menteri KP ini merupakan perbaruan dari Keputusan Menteri KP Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan yang memiliki masa kerja hingga tanggal 31 Desember 2023. Pada triwulan II telah disahkan Kepmen KP Nomor 44 Tahun 2024 pada tanggal 11 Juni 2024 tentang Tim Penilai Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan.

Pada triwulan III yaitu Hari Rabu-Jumat tanggal 30 Juli – 2 Agustus 2024 bertempat di The Mirah Hotel, Jl. Pangrango No. 9A Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat telah dilakukan penilaian usulan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.

Terdapat 3 jenis ikan baru yang dilakukan penilaian pada tahun ini yaitu:

- a. Ikan Nila Aquafarm Nusantara (Nila AN) yang dihasilkan oleh PT Aqua Farm Nusantara dengan hasil: Lulus
- b. Ikan Red Marine Tilapia yang dihasilkan oleh PT Central Proteina Prima Tbk dengan hasil: Lulus
- c. Ikan Black Marine Tilapia yang dihasilkan oleh PT Central Proteina Prima Tbk dengan hasil: Tidak Lulus

Dari ketiga jenis ikan yang diajukan untuk penilaian ini semuanya diproduksi oleh swasta. Dalam hal ini KKP menyambut baik keterlibatan pihak swasta/masyarakat dalam memproduksi induk unggul. Mengingat saat ini kegiatan terkait penelitian untuk memproduksi induk unggul sudah tidak ada lagi di KKP.

Dari hasil penilaian oleh Tim Penilai Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan terdapat beberapa masukan untuk perbaikan naskah akademik. Saat ini telah disampaikan perbaikan naskah akademik untuk Ikan Nila Aquafarm Nusantara dan Ikan Red Marine Tilapia. Sedangkan untuk Ikan Black Marine Tilapia disepakati belum diusulkan tahun ini karena masih banyak data yang perlu dilengkapi.

Jika hasil perbaikan naskah akademik oleh pihak pengusul disetujui oleh Tim Penilai, maka akan diajukan Rancangan Kepmen Pelepasan Jenis Ikan Baru ke Biro Hukum KKP untuk dapat dilakukan rilis ke masyarakat.

Pada triwulan I telah dikeluarkan Keputusan Badan Standardisasi Nasional Nomor 70/KEP/BSN/3/2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar untuk dapat dilakukan pembahasan bersama BSN dan komite teknis 65-07 Perikanan Budidaya.

Pada triwulan II telah dilaksanakan pembahasan RSNI 1 pada tanggal 19-21 Juni 2024 di Onih Hotel dengan hasil akhir berupa RSNI 2. Terdapat 6 judul yang dibahas yaitu:

- a. Induk Udang Penaeid
- b. Benih Udang Penaeid
- c. Produksi benih Udang Penaeid
- d. Benih Bening Lobster
- e. Induk Ikan Kuwe
- f. Benih Ikan Kuwe

Pada triwulan III telah dilakukan Rapat Konsensus RSNI-3 Bidang Perbenihan dan Kaji Ulang SNI oleh Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya di The Mirah Bogor pada tanggal 6-9 Agustus 2024. Pada rapat consensus ini disepakati bahwa 6 judul RSNI-2 yang telah dikonsensuskan akan dilakukan perbaikan oleh konseptor sesuai dengan masukan Komtek dan peserta rapat dan ditetapkan menjadi RSNI-3.

Tahap penyusunan SNI selanjutnya adalah jajak pendapat yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk selanjutnya disahkan menjadi SNI.

3.2.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan

3.2.4.1. Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB

Pada tahun 2024, DJPB menargetkan sebanyak 150 unit pembenihan mendapatkan pembinaan dalam rangka persiapan menuju sertifikasi CPIB, dengan target pada IKU adalah 50% unit pembenihan yang mendapatkan pembinaan dapat tersertifikasi. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 252 unit pembenihan.

Tabel 3.15. Capaian Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CPIB

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang perbenihan							
IKU		Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB							
2023		2024			% Capaian		% perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW III	Tahun 2023	Tahunan	TW III	TW III	Thd realisasi TW III 2024	Thd target tahun 2024	TW III 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	-	50%	25%	31,75%	126,98%	63,49%	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi IKU Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB belum terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya peralihan wewenang lembaga yang dapat melakukan penilaian kesesuaian untuk sertifikasi. Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menjadi tugas dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

3.2.5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Rumput Laut

3.2.5.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Direktorat Rumput Laut

Indikator kinerja ini adalah adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar profesional ASN terdiri dari :

- a. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobot dimensi ini sebesar 25%, dengan besaran sub-bobot : (i) S-3 sebesar 25%; (ii) S-2 sebesar 20%; (iii) S-1/D-IV sebesar 15%; (iv) D-III sebesar 10%; (v) SLTA/D-I/D- II/sederajat sebesar 5%; dan dibawah SLTA sebesar 1%.
- b. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis).

Tabel 3.16. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut TW 3 tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
IKU		Indeks Profesional ASN Lingkup Diektorat Rumput Laut							
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	81	85	-	-	-	105,6	-	85	105,59

Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat semesteran, maka hasil penilaian TW 3 tidak dapat disajikan. Rencana aksi untuk triwulan 4 (semester 2), diharapkan menghimbau kepada seluruh PNS pada Direktorat Rumput Laut agar dapat lebih

meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan secara online maupun offline.

3.2.5.2. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Rumput Laut

Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal KKP terhadap pemenuhan dokumen dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.17. Capaian Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
IKU		Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Rumput Laut							
Realisasi		Target (%)		Realisasi	Capaian		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	64,05	82	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan, maka hasil penilaian belum dapat disajikan. Namun rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Dit. Rumput Laut.

3.2.5.3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang dokumen tindak lanjutnya dari Direktorat Rumput Laut telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Rumput Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada Tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan

Tabel 3.18. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
IKU		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
100	100	80	80	74,07	92,59	92,59	74,07	80	92,59

Pada triwulan 3 tahun 2024 capaian hasil pengawasan inspektorat jenderal perikanan budidaya terhadap pelaksanaan kegiatan Direktorat Rumput Laut sebesar 74,07%. Apabila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2023, pencapaian target Direktorat Rumput Laut menunjukkan hasil sebesar 74,07%. Rekomendasi atas rencana aksi TW 4 tahun 2024, Direktorat Rumput Laut agar meningkatkan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel.

3.2.5.4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut

Indikator Kinerja (IK) pada sasaran strategis ini adalah persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 2 yang mendistribusikan informasinya melalui *platform Portal Collaboration Office*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IK dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui

penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 3.19. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar TW 3 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
IKU		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
100	125,9	94	94	133,33	141,84	141,84	133,33%	-	-

Pada TW 3 tahun 2024 target manajemen pengetahuan yang terstandar pada Direktorat Rumput Laut ditargetkan sebesar 94% dengan realisasi 133,33%. Apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya capaian menunjukkan ada kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai yang salah satu penyebabnya adalah manajemen pengetahuan terstandar pada TW 3 tahun 2024 hanya diwajibkan bagi Eselon 2.

Rencana aksi atas hasil capaian di TW 3 tahun 2024, agar eselon 2 selalu mempersiapkan laporan yang dianggap perlu untuk dipublikasikan secara benar dengan memperhatikan kaidah transparan, efisien selalu tepat waktu dan tepat sasaran.

3.2.5.5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan di satker direktorat Rumput Laut pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;

2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Tabel 3.20. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
IKU		Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Rumput Laut							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	93,46	80	-	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan 3 tahun 2024, capaian belum tersedia karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Namun demikian, untuk mempertahankan nilai efektifitas yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya, Direktorat Rumput Laut berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

3.2.5.6. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Indikator Kinerja ini merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar didatabase KUSUKA dengan status submit, valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengupdate data pelaku usaha yang terlibat dikegiatan Rumput Laut. Target total pelaku usaha yang terdaftar di KUSUKA pada tahun 2024 sebanyak 4833 orang.

Tabel 3.21. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA TW 3 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
IKU		Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA							
Realisasi (%)		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
248,23	80	91	50	67,6	135,2	74,29	27,23	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA pada triwulan 3 tahun 2024 seperti tertera dalam tabel 3.21., realisasi mencapai 67,6% atau sekitar 135,2% dari target triwulan 3. Kondisi ini

menunjukkan bahwa persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA cukup besar dan sudah dikategorikan baik karena telah melebihi dari target, namun dalam pelaksanaan selanjutnya masih dapat dioptimalkan Kembali.

Rencana tindak lanjut di triwulan berikutnya agar pelaku usaha yang terlibat di kegiatan Rumput Laut didorong untuk mendaftar di aplikasi KUSUKA sehingga tercantum di database.

3.2.5.7. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut

Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.22. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan IKU		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	-	75	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kegiatan nilai pengawasan kearsipan unit kearsipan Direktorat Rumput Laut pada TW 3 tahun 2024 belum dapat diukur karena indikator ini bersifat tahunan serta tidak ada dalam rentra DJPB 2020- 2024 sehingga belum dapat dijadikan pembanding atas keberhasilan pada tahun sebelumnya. Namun

demikian, agar target kegiatan ini tercapai di akhir tahun, Direktorat Rumput Laut berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

3.2.5.8. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut

Persentase layanan perkantoran direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.23. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut TW 3 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
IKU		Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
100	75	80	80	100	125	125	100	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaksanaan layanan perkantoran TW 3 tahun 2024 seperti tertera dalam tabel 3.23., realisasi mencapai 100 atau sekitar 125 persen dari target 80 yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Rumput Laut terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan persuratan berdasarkan data yang masuk untuk permintaan nomor sebanyak 418 surat dengan semua permintaan nomor surat terlayani dan layanan rapat yang dilakukan secara offline dari total permintaan 35 kali semuanya telah tuntas dilakukan.

Rencana aksi atas capaian triwulan berikutnya adalah untuk meningkatkan pelayanan lebih baik agar tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3.2.5.9. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut

Persentase realisasi keuangan direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas realisasi penyerapan anggaran berdasarkan terhadap pagu anggaran Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.24. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut TW 3 tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut							
IKU		Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 3	Tahun 2023	Tahunan	TW 3	TW 3	Thd realisasi TW 3 2024	Thd target tahun 2024	TW 3 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
87,7	99,98	98	65	34,24	52,68	34,94	39,04	-	-

Capaian indikator kegiatan Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut TW 3 tahun 2024, seperti terlihat dalam tabel dimana realisasi mencapai 34,24 persen dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target TW 3 sebesar 65% disebabkan oleh sejumlah kegiatan yang masih belum selesai serta belum dapat dilaksanakan sehingga anggaran belum dapat diserap untuk direalisasikan.

Rencana aksi atas hasil capaian triwulan 3 pada tahun 2024, Direktorat Rumput Laut akan mempercepat pelaksanaan realisasi kegiatan sehingga target pada TW 4 dapat tercapai.

BAB 4. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan III tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Rumput Laut.
2. Terhadap capaian kinerja, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap capaian triwulan III tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
3. Secara umum, Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Rumput Laut yang diperjanjikan pada triwulan III tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 110,53% namun ada indikator kinerja keuangan yang dibawah target.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja triwulan III Direktorat Rumput Laut tahun 2024 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Perlu mempertahankan target - target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Direktorat Rumput Laut akan memantau dan berkoordinasi dengan bagian Program DJPB kemungkinan penyesuaian target apabila terjadi perubahan anggaran, hal ini untuk menghindari terjadi revisi perjanjian kinerja.
3. Melakukan percepatan pembinaan terhadap unit pembenihan yang sudah mengusulkan untuk dilakukan sertifikasi CPIB.
4. Direktorat Rumput Laut akan memperbaiki dalam perencanaan kedepan agar dapat mengajukan pembayaran dari kegiatan bantuan masyarakat dilakukan secara Lumpsum (LS) dan diusahakan pengajuan jangan sampai diakhir bulan triwulan berikutnya.